



1ST CONGRESS **UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA** **Resolution**

Perjuangan bangsa Papua untuk hidup bebas, Merdeka, berdaulat, damai dan harmonis diatas tanah leluhurnya adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu maka perjuangan untuk kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan, kedamaian dan keharmonisan hidup di tanah Papua yang secara politik dimulai sejak berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan wujud upaya bangsa Papua dalam mempertahankan jatidiri, martabat, dan kedaulatan menentang segala bentuk penjajahan.

Setelah hidup dalam penjajahan begitu lama, menderita tanpa jaminan keselamatan hidup di tangan penjajah, tanpa keadilan disertai perlakuan tidak manusiawi dan merusak keharmonisan hidup hidup diantara segenap komunitas makhluk, dengan pengorbanan hartabenda, harga diri, martabat, dan jatidiri di tangan penjajah, sebagai dampak penjajahan dan resiko perjuangan maka **Sejarah telah mengantar bangsa Papua ke pintu gerbang Kemerdekaannya.**

Maka atas nama moyang bangsa Papua, Atas nama segenap komunitas makhluk, atas nama tulang – belulang dan atas nama anak cucu yang akan datang, dengan memanjatkan Syukur ke hadapan YAHWEH ELOHIM, Raja alam semesta, rakyat bangsa Papua telah sukses menyelenggarakan Kongres pertama United Liberation Movement for West Papua;

1. Rakyat bangsa Papua, Pemilik hak kesulungan Penjaga tanah dan perjuangan kemerdekaan West Papua dengan kesadaran penuh, semangat tinggi, sehat jasmani dan rohani telah menggelar Kongres Pertama ULMWP pada tanggal 20 – 23 November 2023 di tanah Tabi Numbay– West Papua dan dihadiri oleh kurang lebih 5000an peserta dari masing masing 7 wilayah West Papua.
2. Dengan pertolongan, bimbingan dan hikmat TUHAN YAHWEH ELOHIM maka kongres pertama United Liberation movement for West Papua telah mengeluarkan Communique;
 - 2.1. **Kongres menetapkan;**

- 2.1.1. Amandemen Undang – Undang Dasar Sementara ULMWP
- 2.1.2. Amandemen Undang – Undang Executive Council
- 2.1.3. Undang – Undang Legislative Council
- 2.1.4. Undang – Undang Hubungan Luar Negeri
- 2.1.5. Undang – Undang Pertahanan dan Keamanan
- 2.1.6. Struktur Pemerintah Sementara ULMWP selama 5 tahun terhitung sejak tahun penetapan.
 - 2.1.6.1 Hon. Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintah Sementara ULMWP
 - 2.1.6.2 Rev. Edison Waromi, SH sebagai Perdana Menteri Pemerintah Sementara ULMWP

2.2. Kongres Membatalkan;

- 2.2.1. Semua dasar hukum ULMWP yang berlaku sebelum Kongres Pertama ULMWP terlaksana dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku sejak kongres memutuskan dan menetapkan dasar hukum yang sah.
- 2.2.2. Pengangkatan struktur ULMWP pada KTT ULMWP 2023 di Port Vila Vanuatu dibatalkan dan dinyatakan gugur demi hukum karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Sementara ULMWP tahun 2020, BAB II, Pasal 5 ayat 1 – 12 tentang pelaksanaan kongres sebagai forum tertinggi, Bab VII, Pasal 10 tentang Pembentukan Legislative Council, Bab VIII, Pasal 11 tentang Pembentukan Executive Council, Bab IX pasal 12, tentang pembentukan Judicative Council

2.3. Kongres Mempertegas Kembali;

- 2.3.1. Penegakan Konstitusi dengan telah membentuk Badan Kongres yang terdiri dari Legislative Council dan Senat
- 2.3.2. Badan Kongres terdiri Legislative council dan Senat
- 2.3.3. Paket diplomasi Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua
- 2.3.4. Visi Negara Green State
- 2.3.5. Pengumuman 12 Kabinet Pemerintah Sementara ULMWP
- 2.3.6. Pengangkatan 7 kepala wilayah di West Papua.

2.3.7. West Papua Army (TPNPB, TRWP, TNPB) sebagai pertahanan dan keamanan West Papua.

2.4. Kongres Membentuk Badan Adhoc

2.4.1. Dewan Penasehat Agung

2.4.2. Konstituante

2.4.3. Pertahanan dan Keamanan

2.5. Kongres Mengakui;

2.5.1. Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Parlemen Nasional West Papua Sebagai pilar pendiri dan deklarator ULMWP.

2.5.2. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai organisasi kemahasiswaan untuk membangun solidaritas di setiap kota study Indonesia menuju hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua.

2.5.3. Mengakui Agenda Mogok sipil yang didorong oleh Komite Nasional Papua Barat sebagai agenda strategy menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri bangsa Papua sehingga menghimbau kepada seluruh rakyat West Papua melakukan konsolidasi bersama.

2.6. Kongres Meminta;

2.6.1. Kepada pemimpin – pemimpin negara anggota MSG, PIF dan OACP untuk segera mendesak Komisi Tinggi Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua dalam rangka Investigasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh colonial Indonesia.

2.6.2. Kepada pemimpin – pemimpin negara anggota MSG memberikan jaminan hukum dengan menjadikan West Papua anggota penuh kedalam MSG sebagai langkah maju menyelesaikan konflik politik maupun bersenjata yang panjang sesuai dengan mekanisme internasional.

2.6.3. Kepada IPWP dan ILWP untuk segera mengambil Langkah – langkah hukum dan Politik dalam rangka tinjau kembali hasil pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum Internasional di Irian Barat ,yang hari ini disebut Papua.

2.7. Kongres Menolak;

- 2.7.1. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kedaulatan bangsa Papua dan semua bentuk kebijakan atas rakyat dan Tanah air Papua
- 2.7.2. Penyelesaian, status politik Papua melalui yuridiksi hukum Indonesia (Dialogue Jakarta – Papua dan Jedah Kemanusiaan)

Port Numbay, West Papua 23 November 2023

Legislative Council

PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP



BUCHTAR TABUNI

Ketua Kongres